



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE

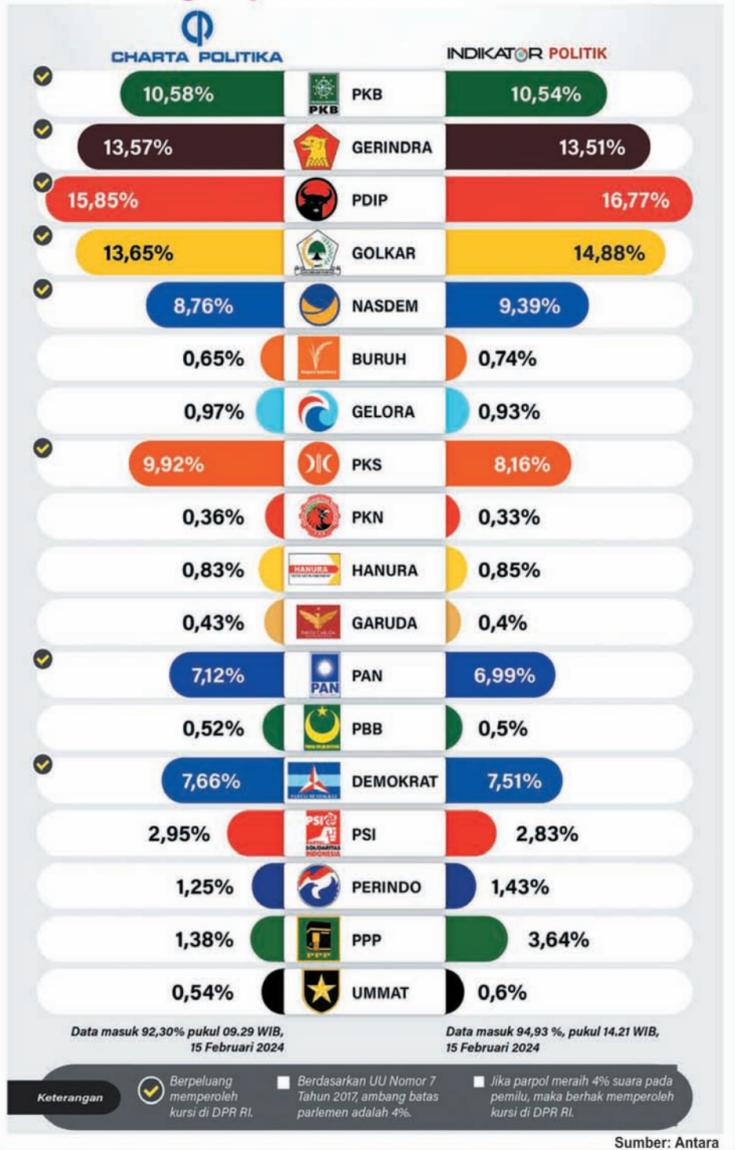


JUMAT PON

16 FEBRUARI 2024 (5 RUWAH 1957 / TAHUN LXXIX NO 136)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Hasil Hitung Cepat Partai Politik Pemilu 2024



Sirekap Bukan Penentu

2.325 TPS Salah Konversi Formulir C

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebutkan, sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami salah konversi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Kendati demikian, KPU belum mengecek secara detail terkait jumlah suara yang tidak tepat. "Kami sudah pantau dan memonitor ada di 2.325 TPS," ujar Hasyim di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (15/2).

Menurutnya, kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano yang

diunggah bersifat acak. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang salah di 2.325 TPS sudah teridentifikasi oleh sistem. KPU juga sudah meminta agar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan koreksi terhadap konversi yang salah. "Supaya pemindaian itu jelas dan terbaca sebagaimana tertulis di dalam formulir," jelasnya.

Hasyim menjelaskan, Formulir Model C1-Plano diunggah oleh petugas KPPS menggunakan fitur foto dalam aplikasi Sirekap. Kemudian, terdapat sistem konversi dalam Sirekap yang berfungsi membaca

formulir tersebut.

Kemudian, secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Di situ-lah, muncul masalah perbedaan angka antara Formulir Model C1-Plano dan Sirekap.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan KPU untuk perhitungan suara. KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat

* Bersambung hal 7 kol 1

HITUNG CEPAT SEMENTARA

PDIP di Posisi Teratas

JAKARTA (KR) - PDI Perjuangan menjadi partai politik (parpol) unggul atau berada di posisi teratas dalam hitung cepat (*quick count*) sementara Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia dengan perolehan suara sebesar 16,77 persen.

Hasil tersebut didapatkan dalam penghitungan cepat hingga pukul 14.37 WIB yang dipantau di Jakarta, Kamis (16/2), dengan data masuk

sebanyak 94,93 persen, tingkat partisipasi sebesar 78,36 persen dan sampel suara sah 488.108 suara.

Berikutnya, posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 14,88 persen, posisi ketiga Partai Gerindra dengan raihannya sebesar 13,51 persen dan posisi keempat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10,54 persen suara.

Selanjutnya, posisi kelima ditempati Partai NasDem dengan perolehan suara 9,39 persen, posisi keenam

adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,16 persen suara, posisi ketujuh adalah Partai Demokrat dengan 7,51 persen suara, dan di posisi kedelapan adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 6,99 persen suara.

Sementara itu, dalam hitung cepat tersebut, terdapat delapan parpol yang ditempuh terancam tidak lolos ke Senayan karena berdasarkan syarat yang telah ditetapkan

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis Pasca-pencoblosan

Indra Tranggono



PASCA-pencoblosan di bilik suara, masyarakat pun penasaran atas hasil pilpres 2024. Pilpres mana yang menang? Tentu menang dengan jujur dan adil. Tak ada manipulasi hasil perolehan suara dan penyimpangan lainnya. Sehingga tidak berbuntut kecacauan. Karena pemilu adalah pesta demokrasi yang membahagiakan rakyat.

Negara harus berterima kasih kepada rakyat yang telah berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu kali ini, terutama pilpres, dinilai oleh pakar politik, hukum dan kaum cendekiawan sebagai pemilu yang tak sepenuhnya ideal. Penyimpangan terjadi, dari penyelenggara negara yang tidak mampu bersikap netral, pembagian bansos yang bertendensi politik, pelanggaran etika terkait konstitusi, politik uang dan lainnya. Kampus-kampus dan berbagai kalangan yang peduli pada sehatnya demokrasi pun bersuara lantang. Mereka mendesak negara untuk menjunjung etika dalam berpolitik dan kembali pada rel demokrasi yang benar. Rakyat juga mencatat dan *niteni* (menandai) serta menilai penyimpangan etik dan moral itu.

Kita berharap negara menggunakan telinga dan mata batin untuk merespons semua kritik masyarakat. Bukan hanya reaksi defensif dan apologis. Negara tak perlu pongah jika tidak ingin rakyat bertambah marah. Negara justru harus rendah hati dan bijak serta memiliki kemauan. Peristiwa tahun 1998 di mana rezim Orde Baru dilengserkan

* Bersambung hal 7 kol 1

SIDANG BARU AKAN DIGELAR 21 FEBRUARI Gugatan Anwar Usman di PTUN Belum Diputus

JAKARTA (KR) - Gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus. Sidang dengan agenda jawaban gugatan baru akan digelar tanggal 21 Februari besok.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono di Jakarta, Kamis (15/2). "Setahu saya belum ada putusan apa pun terkait gugatan tersebut," katanya.

Fajar merespons informasi yang beredar bahwa gugatan Anwar Usman telah diputus oleh PTUN Jakarta dengan amar putusan mengembalikan kedudukan Anwar sebagai Ketua MK. Padahal, sidang dengan agenda ja-



KR-Antara/Akbar Nugroho Gumay

Calon Hakim Konstitusi (MK) Arsul Sani (kanan) berjabat tangan dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim MK di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

waban gugatan baru akan digelar akhir bulan ini.

Sebelumnya, Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan

meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah. "Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat

* Bersambung hal 7 kol 5

SOAL PUNGLI DI RUTAN KPK Dewas Putuskan 12 Pegawai Bersalah

JAKARTA (KR) - Sebanyak 12 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bersalah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka terbukti telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam prapelayanan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Menurut Tumpak, 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Kepada mereka dijatuhi hukuman diwajibkan melakukan permintaan maaf secara terbuka. "Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna peninjauan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan

* Bersambung hal 7 kol 5

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:07	18:06	19:17	04:25

Jumat, 16 Februari 2024
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Pelunasan Bipih Tahap I Diperpanjang

YOGYA (KR) - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jemaah reguler, dari semula 12 Februari diperpanjang hingga 23 Februari 2024. Masa pelunasan Tahap I Bipih 1445 H sudah dibuka sejak 10 Januari. Namun demikian, belum seluruh jemaah reguler melunasi Bipih.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY H Aidi Johansyah SAG MM berharap, para jemaah haji reguler yang sudah *istithaah* (memiliki kemampuan melaksanakan haji) dan sudah memiliki keuangan yang cukup untuk segera melunasi. "Mumpung ada perpanjangan waktu. Harapannya, bisa melunasi Tahap I. Kalau tidak bisa melunasi, tidak bisa tahap II," ujar Aidi Johansyah, Kamis (15/2).

Jemaah reguler yang diberikan kesempatan pelunasan di tahap II, hanya yang mengalami gagal sistem dalam pembayaran dan mereka yang sedang dalam pengobatan, sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Lantas siapa saja yang diberikan kesempatan melunasi Bipih tahap II, menurut Aidi Johansyah, kesempatan pertama diberikan kepada jemaah reguler yang

* Bersambung hal 7 kol 1

MUSNAHKAN DOKUMEN KEUANGAN

Mantan Plh Ketua PMI Kota Jadi Tersangka

"Penahanan ini untuk mempercepat proses penyidikan karena ada alasan bahwa tersangka akan melarikan diri, men-

gurangi perbuatan atau merusak barang bukti," ungkapnya, Kamis (15/2).

Diterangkan Saptana, perbuatan itu dilakukan

tersangka pada 20 November 2021 dan tanggal 7 Juni 2022. Tersangka memerintahkan staf PMI Kota Yogyakarta untuk

mengeluarkan berkas dan dokumen pengelolaan keuangan PMI Kota Yogyakarta periode 2016 - 2021

* Bersambung hal 7 kol 5



Tersangka sebelum digelandang ke Rutan di LP Kelas II A Yogyakarta.

KR-Istimedia

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● MINGGU 28 Januari 2024, siswa ibuku datang membawakan alpukat sudah matang. Ternyata alpukat yang benar-benar sudah matang teksturnya beda dengan alpukat belum matang yang hijau segar. (Haura Arzaqi Wijayantri, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta)-d